



Pemerintah Kota Surakarta
Kecamatan Jebres

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN LKjIP 2023

KECAMATAN JEBRES
KOTA SURAKARTA



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN JEBRES

kec-jebres.surakarta.go.id

@kecjebres

0271656961

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dapat tersusun dengan baik.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan pelaporan kinerja yakni memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes di masa mendatang.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di Kecamatan Jebres di masa mendatang.

**Camat Jebres**

DYAH SARASWATI, S.STP.M.A.P.
NIP. 19801023 199912 2 001

DAFTAR ISI		
PENGANTAR.....		i
DAFTAR ISI.....		ii
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Gambaran Umum Organisasi.....	1
	B. Fungsi Strategis Kecamatan Jebres.....	23
	C. Permasalahan Utama yang Dihadapi Perangkat Daerah.....	23
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	25
	A. Indikator Kinerja Utama.....	26
	B. Rencana Kinerja Tahunan.....	27
	C. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022.....	21
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022	48
	A. Capaian Kinerja Organisasi.....	48
	B. Sasaran I	58
	C. Sasaran II	70
	D. Sasaran III.....	70
	E. Realisasi Anggaran.....	80
	F. Pencapaian Lainnya	81
BAB IV	PENUTUP.....	82
	A. Kesimpulan.....	82
	B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja ke Depan.....	83
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

a. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan memiliki tugas membantu Walikota mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan serta pelimpahan Sebagian urusan pemerintah bidang lainnya. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan melaksanakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan umum;
- b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan public
- c. Penyelenggaraan upaya ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
- e. Pembinaan dan pengawasan pemerintahan kelurahan;
- f. Penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat;
- h. Pelaksanaan kesekretariatan kecamatan terkait perencanaan dan keuangan, administrasi dan kepegawaian serta organisasi; dan
- i. Pelaksanaan tugas lin yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas, Camat memiliki fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan umum;
- b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Penyelenggaraan Fasilitasi Penilaian Pemeberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- e. Penyelenggaraan upaya ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
- g. Pembinaan dan pengawasan pemerintahan kelurahan;
- h. Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- i. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat;

- j. Pelaksanaan kesekretariatan kecamatan terkait perencanaan dan keuangan, administrasi dan kepegawaian serta organisasi; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Camat didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut:

1) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian dan tata laksana pelayanan publik, kehumasan dan kerja sama.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja kecamatan;
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan kecamatan;
- 3) Penyelenggaraan administrasi umum kecamatan;
- 4) penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada kecamatan;
- 5) penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah lingkup kecamatan;
- 6) penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup kecamatan;
- 7) penyelenggaraan layanan pengadaan barang/ jasa lingkup kecamatan;
- 8) penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
- 9) penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan pu blik serta pengelolaan kepegawaian;
- 10) penyelenggaraan kehumasan dan kerjasama;
- 11) pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- 12) Pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- 13) pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 14) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris Camat membawahi beberapa sub-bidang yaitu:

- i. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- ii. Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi.
 - (i) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan.

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) menyusun dokumen perencanaan kecamatan;
- 2) menyusun dokumen RKA-kecamatan dan perubahan RKA-kecamatan;
- 3) menyusun DPA-kecamatan dan perubahan DPAkecamatan;
- 4) menyusun laporan dan evaluasi kinerja kecamatan;
- 5) memformulasikan sajian untuk analisis;
- 6) melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
- 7) menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
- 8) menyusun alternatif dan model hubungan kausal/ fungsional;
- 9) menguji alternatif kriteria dan model;
- 10) menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek pada lingkup kecamatan;
- 11) menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;
- 12) menyusun perencanaan program dan kegiatan lingkup kecamatan;
- 13) menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan pada lingkup kecamatan;
- 14) melakukan telaahan lingkup kecamatan terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif;
- 15) melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan pada lingkup dinas
- 16) menyusun dan pembayaran gaji dan tunjangan ASN;
- 17) melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan kecamatan
- 18) menyusun dan pelaksanaan akuntansi kecamatan;

- 19) menyusun laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun kecamatan;
- 20) melaksanakan pengelolaan dan tanggapan pemeriksaan;
- 21) menyusun pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
- 22) membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- 23) mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- 24) melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 25) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- (ii) Kepala Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan kelembagaan, tata laksana kecamatan, surat menyurat, pengelolaan arsip, pengelolaan sarana prasarana kecamatan, pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengelolaan pelayanan umum, penatausahaan barang milik daerah pada kecamatan.

Adapun rincian tugasnya sebagai berikut:

- 1) Mendiagnosis struktur/kelembagaan/tatalaksana/proses bisnis yang efektif untuk instansi pemerintah;
- 2) menyusun pedoman dan petunjuk teknis, ketatalaksanaan, prosedur, mekanisme dan hubungan kerja;
- 3) melaksanakan penyiapan bahan pengembangan pelayanan publik;
- 4) melaksanakan penyiapan bahan pengembangan reformasi birokrasi;
- 5) Menyusun data dan pengolahan administrasi kepegawaian pada kecamatan;
- 6) Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait produk hukum daerah;
- 7) Menganalisis proses penyusunan kebutuhan aparatur sipil negara;

- 8) Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, rencana redistribusi pegawai atau proyeksi kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta jabatan aparatur sipil negara;
- 9) Menyusun dokumen standar kompetensi jabatan lingkup kecamatan;
- 10) menganalisis proses penugasan aparatur sipil negara
- 11) menyusun rencana pengembangan individu pegawai (*individual development plan*)
- 12) menyusun peta strategi (*strategy map*) unit kerja/ organisasi/ instansi pemerintah;
- 13) mengelola proses manajemen kinerja pegawai;
- 14) menyusun dan mengelola jasa surat menyurat; jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; jasa peralatan dan perlengkapan kecamatan;
- 15) melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada kecamatan;
- 16) penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
- 17) menyusun dan mengelola jasa pelayanan umum kecamatan;
- 18) menyusun dan mengelola komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- 19) menyusun dan menyediakan peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- 20) melaksanakan pengadaan dan pengelolaan kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor;
- 21) melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat koordinasi. konsultasi dan fasilitasi kunjungan tamu;
- 22) melaksanakan dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada kecamatan;
- 23) menyusun perencanaan kebutuhan, pengamanan, penilaian, pembinaan dan pelaporan barang milik daerah pada kecamatan;
- 24) melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada kecamatan;
- 25) melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan barang milik daerah pada kecamatan;
- 26) membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;

- 27) mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- 28) melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertical maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas
- 29) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pelayanan Publik

Kepala Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pelayanan kepada masyarakat di kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

Kepala Seksi Pelayanan Publik memiliki uraian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
- c. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non usaha;
- d. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
- e. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas
- f. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan
- g. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.

Dalam melaksanakan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
- b. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;

- c. melaksanakan penyelenggaraan Lembaga kemasyarakatan;
- d. melaksanakan peningkatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan;
- e. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
- f. melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- g. melaksanakan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- h. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- i. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- j. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

4) Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas:

- a) Melaksanakan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi lain;
- b) melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- c) melaksanakan sinergitas dengan instansi lain terkait penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d) melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e) membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- f) mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- g) melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5) Seksi Pembangunan

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah dan / atau instansi yang terkait dale pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
- b. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- c. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fiingsinya.

2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kelurahan

1. Struktur Organisasi Kelurahan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Lurah

Lurah mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan di wilayah kelurahan.

Lurah memiliki uraian tugas:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- d. pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan sarana dan fasiitas umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan

g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Sekretaris memiliki uraian tugas:

- a. penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja kelurahan;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan kelurahan;
- c. penyelenggaraan administrasi umum kelurahan;
- d. penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada kelurahan;
- e. penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup kelurahan;
- f. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/ jasa lingkup kelurahan;
- g. penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
- h. penyiapan bahan pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik;
- i. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- j. pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- k. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Ketentraman Ketertiban

Seksi Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Ketentraman Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

Kepala Seksi Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Ketertiban memiliki uraian tugas:

- a. melaksanakan koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;

- b. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan;
- c. melaksanakan sinergitas dengan instansi lain terkait penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan;
- d. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat Kelurahan;
- e. melaksanakan Upaya Keamanan ketenteraman dan ketertiban di kelurahan;
- f. melaksanakan Pembinaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di kelurahan;
- g. melaksanakan Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum;
- h. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- 1. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- J. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat memiliki uraian tugas:

- a. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- b. melaksanakan evaluasi kelurahan;
- c. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kelurahan;
- d. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan;
- e. melaksanakan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan;
- f. melaksanakan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan;
- g. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan;

- h. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- i. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- j. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

e. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Kepala Seksi Pembangunan memiliki uraian tugas:

- a. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
- b. melaksanakan koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah dan/ atau instansi terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah kelurahan
- c. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- d. melaksanakan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Kelurahan;
- e. melaksanakan Rangkaian Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan;
- f. melaksanakan pengelolaan Bantuan - bantuan Pembangunan dari Pemerintah dan Pihak Swasta;
- g. melaksanakan Pelimpahan Kewenangan dibidang Pembangunan, RTH dan Pengelolaan Persampahan;
- h. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- i. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Struktur Organisasi Kecamatan

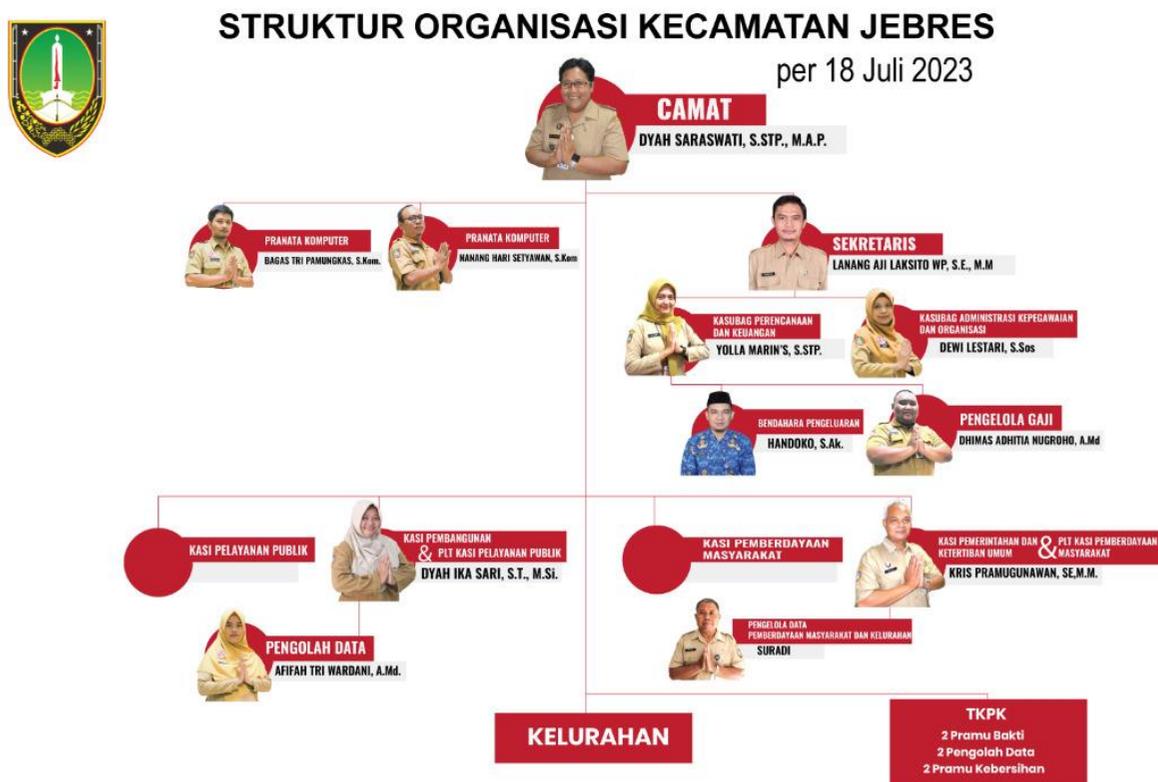
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

Camat yang membawahi ;

- a. Sekretaris Camat yang membawahi;
 - 1) Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi;
 - 2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Seksi Tata Pemerintahan;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Kecamatan Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar I.1



2. Struktur Organisasi Kelurahan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

Lurah membawahi :

- a. Sekretaris Kelurahan
- b. Seksi Tata Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Ketentraman Ketertiban
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- d. Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup
- e. Kelompok Jabatan fungsional

Kecamatan Jebres terbagi menjadi Kelurahan-Kelurahan sebagai berikut

- a. Kelurahan Kepatihan Kulon;
- b. Kelurahan Kepatihan Wetan;
- c. Kelurahan Sudiroprajan;
- d. Kelurahan Gandekan;
- e. Kelurahan Sewu;
- f. Kelurahan Pucangsawit;
- g. Kelurahan Jagalan;
- h. Kelurahan Purwodiningratan;
- i. Kelurahan Tegalharjo;
- j. Kelurahan Jebres; dan
- k. Kelurahan Mojosongo.

Susunan organisasi Kelurahan Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.2



Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Susunan Kepegawaian Perangkat Daerah Kecamatan

Kecamatan Jebres terdiri dari tenaga PNS dan TKPK. TKPK di Kecamatan Jebres menggunakan system kontrak setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya sesuai dengan rincian table dibawah ini:

Tabel I.1
Susunan Kepegawaian Kecamatan Jebres
Berdasarkan Struktural

Tingkat Jabatan	Jumlah	
	L	P
Eselon III A	1	0
Eselon III B	0	1
Eselon IV	1	3
Staf *)	5	1
TKPK	5	1
Jumlah	12	6

*)Termasuk PNS dan Tenaga Non-PNS

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Jebres Desember 2023

Tabel I.2
Susunan Kepegawaian Kecamatan Jebres Berdasarkan Golongan Ruang

Golongan Ruang	Jumlah	
	L	P
IV	1	2
III	6	2
II	0	1
Jumlah	7	5

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jebres Desember 2022

Tabel I.3
Susunan Kepegawaian Kecamatan Jebres
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	
	L	P
S2	2	2
S1	3	0
Diploma IV	0	1
Diploma III	1	1
SMU	1	
SMP		
SD		
Jumlah	7	5

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jebres Desember 2023

Tabel I.4
Susunan Kepegawaian Kecamatan Jebres
Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan

Pendidikan Perjenjangan	Jumlah	
	L	P
Diklat Pim III	1	0
Diklat Pim IV	2	1
Jumlah	3	1

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jebres Desember 2023

Sarana dan Prasarana



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Des-2023

Provinsi : PROVINSI JAWA TENGAH
 Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
 Bidang : Bidang Kecamatan
 Unit Organisasi : Kecamatan Jebres
 Sub Unit Organisasi : Kecamatan Jebres
 U P B : Kecamatan Jebres

KODE	NAMA BARANG	Jml Barang	NILAI INTRA KOMPATABEL (Rp)	Jml Barang	NILAI EKSTRA KOMPATABEL (Rp)	TOTAL (Rp)
1.3	ASET TETAP	444	14.703.811.488,77	452	194.151.665,64	14.897.963.154,41
1	TANAH	1	163.600.000,00	0	0,00	163.600.000,00
1.01	TANAH	1	163.600.000,00	0	0,00	163.600.000,00
01.01	TANAH PERSIL	1	163.600.000,00	0	0,00	163.600.000,00
01.02	TANAH NON PERSIL	0	0,00	0	0,00	0,00
01.03	LAPANGAN	0	0,00	0	0,00	0,00
2	PERALATAN DAN MESIN	388	3.064.778.159,77	452	194.151.665,64	3.258.929.825,41
2.01	ALAT BESAR	2	214.903.301,45	0	0,00	214.903.301,45
01.01	ALAT BESAR DARAT	0	0,00	0	0,00	0,00
01.02	ALAT BESAR APUNG	0	0,00	0	0,00	0,00
01.03	ALAT BANTU	2	214.903.301,45	0	0,00	214.903.301,45
2.02	ALAT ANGKUTAN	8	428.677.175,00	0	0,00	428.677.175,00
02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	5	413.377.175,00	0	0,00	413.377.175,00
02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	3	15.300.000,00	0	0,00	15.300.000,00
02.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	0	0,00	0	0,00	0,00
02.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	0	0,00	0	0,00	0,00
02.05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	0	0,00	0	0,00	0,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	2	5.236.350,00	0	0,00	5.236.350,00
03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	1	4.100.000,00	0	0,00	4.100.000,00
03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0,00	0	0,00	0,00
03.03	ALAT UKUR	1	1.136.350,00	0	0,00	1.136.350,00
2.04	ALAT PERTANIAN	1	2.980.117,43	0	0,00	2.980.117,43
04.01	ALAT PENGOLAHAN	1	2.980.117,43	0	0,00	2.980.117,43
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	386	1.404.577.989,56	392	174.998.865,64	1.579.576.855,20



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
REKAPITULASI BARANG KE NERACA**

PER 31-Des-2023

Provinsi : PROVINSI JAWA TENGAH
 Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
 Bidang : Bidang Kecamatan
 Unit Organisasi : Kecamatan Jebres
 Sub Unit Organisasi : Kecamatan Jebres
 U P B : Kecamatan Jebres

KODE	NAMA BARANG	Jml Barang	NILAI INTRA KOMPATABEL (Rp)	Jml Barang	NILAI EKSTRA KOMPATABEL (Rp)	TOTAL (Rp)
05.01	ALAT KANTOR	38	186.939.017,58	15	10.048.090,00	196.987.107,58
05.02	ALAT BUMAH TANGGA	199	1.075.423.733,56	374	160.650.775,64	1.235.474.509,20
05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEMABAT	43	142.215.238,42	7	4.900.000,00	147.115.238,42
2.05	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	34	925.159.172,48	53	17.477.800,00	942.636.972,48
06.01	ALAT STUDIO	12	428.913.672,46	52	16.627.800,00	445.541.472,46
06.02	ALAT KOMUNIKASI	22	96.245.500,00	1	850.000,00	97.095.500,00
06.03	PERALATAN PEMANCAR	0	0,00	0	0,00	0,00
06.04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	0	0,00	0	0,00	0,00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	0	0,00	0	0,00	0,00
07.01	ALAT KEDOKTERAN	0	0,00	0	0,00	0,00
07.02	ALAT KESEHATAN UHUM	0	0,00	0	0,00	0,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	4	9.333.954,50	2	960.000,00	10.293.954,50
08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0,00	0	0,00	0,00
08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	0	0,00	0	0,00	0,00
08.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	0	0,00	0	0,00	0,00
08.04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	4	9.333.954,50	2	960.000,00	10.293.954,50
08.05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	0	0,00	0	0,00	0,00
08.06	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LA	0	0,00	0	0,00	0,00
08.07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	0	0,00	0	0,00	0,00
08.08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	0	0,00	0	0,00	0,00
08.09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUM	0	0,00	0	0,00	0,00
2.09	ALAT PERSENJATAAN	0	0,00	0	0,00	0,00
09.01	SENJATA API	0	0,00	0	0,00	0,00
09.02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0,00	0	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Des-2023

Provinsi : PROVINSI JAWA TENGAH
 Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
 Bidang : Bidang Kecamatan
 Unit Organisasi : Kecamatan Jebres
 Sub Unit Organisasi : Kecamatan Jebres
 U P B : Kecamatan Jebres

KODE	NAMA BARANG	Jml Barang	NILAI INTRA KOMPATABEL (Rp)	Jml Barang	NILAI EKSTRA KOMPATABEL (Rp)	TOTAL (Rp)
09.03	SENDA SINYAL	0	0,00	0	0,00	0,00
09.04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0,00	0	0,00	0,00
2-10	KOMPUTER	56	454.439.802,37	1	715.000,00	455.154.802,37
10.01	KOMPUTER UNIT	32	296.755.718,73	0	0,00	296.755.718,73
10.02	PERALATAN KOMPUTER	24	157.684.083,64	1	715.000,00	158.399.083,64
2-11	ALAT EKSPLORASI	0	0,00	0	0,00	0,00
11.01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	0	0,00	0	0,00	0,00
11.02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	0	0,00	0	0,00	0,00
2-12	ALAT PENGEBORAN	0	0,00	0	0,00	0,00
12.01	ALAT PENGEBORAN MESIN	0	0,00	0	0,00	0,00
12.02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	0	0,00	0	0,00	0,00
2-13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0,00	0	0,00	0,00
13.01	SUMUR	0	0,00	0	0,00	0,00
13.02	PRODUKSI	0	0,00	0	0,00	0,00
13.03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0,00	0	0,00	0,00
2-14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0,00	0	0,00	0,00
14.01	ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0,00	0	0,00	0,00
14.02	ALAT BANTU PRODUKSI	0	0,00	0	0,00	0,00
2-15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0	0,00	0	0,00	0,00
15.01	ALAT DETEKSI	0	0,00	0	0,00	0,00
15.02	ALAT PELINDUNG	0	0,00	0	0,00	0,00
15.03	ALAT SAR	0	0,00	0	0,00	0,00
15.04	ALAT KERJA PENERBANGAN	0	0,00	0	0,00	0,00
2-16	ALAT PERAGA	0	0,00	0	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Des-2023

Provinsi : PROVINSI JAWA TENGAH
 Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
 Bidang : Bidang Kecamatan
 Unit Organisasi : Kecamatan Jebres
 Sub Unit Organisasi : Kecamatan Jebres
 U P B : Kecamatan Jebres

KODE	NAMA BARANG	Jml Barang	NILAI INTRA KOMPATABEL (Rp)	Jml Barang	NILAI EKSTRA KOMPATABEL (Rp)	TOTAL (Rp)
16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	0	0,00	0	0,00	0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0,00	0	0,00	0,00
17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0,00	0	0,00	0,00
2.18	RAMBU - RAMBU	0	0,00	0	0,00	0,00
18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	0	0,00	0	0,00	0,00
18.02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	0	0,00	0	0,00	0,00
18.03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	0	0,00	0	0,00	0,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	1	19.470.297,00	0	0,00	19.470.297,00
19.01	PERALATAN OLAH RAGA	1	19.470.297,00	0	0,00	19.470.297,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	9	11.337.051.879,00	0	0,00	11.337.051.879,00
3.01	BANGUNAN GEDUNG	9	11.337.051.879,00	0	0,00	11.337.051.879,00
01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	8	10.590.954.925,00	0	0,00	10.590.954.925,00
01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	1	746.096.954,00	0	0,00	746.096.954,00
3.02	MONUMEN	0	0,00	0	0,00	0,00
02.01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	0	0,00	0	0,00	0,00
3.03	BANGUNAN MENARA	0	0,00	0	0,00	0,00
03.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUNAN	0	0,00	0	0,00	0,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0	0,00	0	0,00	0,00
04.01	TUGU/TANDA BATAS	0	0,00	0	0,00	0,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	4	94.555.000,00	0	0,00	94.555.000,00
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	0	0,00	0	0,00	0,00
01.01	JALAN	0	0,00	0	0,00	0,00
01.02	JEMBATAN	0	0,00	0	0,00	0,00
4.02	BANGUNAN AIR	0	0,00	0	0,00	0,00

KONTRIBUSI BARANG KE NERACA 100



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Des-2023

Provinsi : PROVINSI JAWA TENGAH
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
Bidang : Bidang Kecamatan
Unit Organisasi : Kecamatan Jebres
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Jebres
U P B : Kecamatan Jebres

KODE	NAMA BARANG	Jml Barang	NILAI INTRA KOMPATABEL (Rp)	Jml Barang	NILAI EKSTRA KOMPATABEL (Rp)	TOTAL (Rp)
02.01	BANGUNAN AIR IRIGASI	0	0,00	0	0,00	0,00
02.02	BANGUNAN PENGALIRAN PASANG SLURUT	0	0,00	0	0,00	0,00
02.03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	0	0,00	0	0,00	0,00
02.04	BANGUNAN PENGALIRAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN	0	0,00	0	0,00	0,00
02.05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	0	0,00	0	0,00	0,00
02.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	0	0,00	0	0,00	0,00
02.07	BANGUNAN AIR KOTOR	0	0,00	0	0,00	0,00
4.03	INSTALASI	0	0,00	0	0,00	0,00
03.01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	0	0,00	0	0,00	0,00
03.02	INSTALASI AIR KOTOR	0	0,00	0	0,00	0,00
03.03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	0	0,00	0	0,00	0,00
03.04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	0	0,00	0	0,00	0,00
03.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	0	0,00	0	0,00	0,00
03.06	INSTALASI GARDU LISTRIK	0	0,00	0	0,00	0,00
03.07	INSTALASI PERTAHANAN	0	0,00	0	0,00	0,00
03.08	INSTALASI GAS	0	0,00	0	0,00	0,00
03.09	INSTALASI PENGAMAN	0	0,00	0	0,00	0,00
03.10	INSTALASI LAIN	0	0,00	0	0,00	0,00
4.04	JARINGAN	4	94.555.000,00	0	0,00	94.555.000,00
04.01	JARINGAN AIR MINUM	1	56.045.000,00	0	0,00	56.045.000,00
04.02	JARINGAN LISTRIK	2	27.925.000,00	0	0,00	27.925.000,00
04.03	JARINGAN TELEPON	1	10.585.000,00	0	0,00	10.585.000,00
04.04	JARINGAN GAS	0	0,00	0	0,00	0,00
5	ASET TETAP LAINNYA	44	43.826.450,00	0	0,00	43.826.450,00



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Des-2023

Provinsi : PROVINSI JAWA TENGAH
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
Bidang : Bidang Kecamatan
Unit Organisasi : Kecamatan Jebres
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Jebres
U P B : Kecamatan Jebres

KODE	NAMA BARANG	Jml Barang	NILAI INTRA KOMPATABEL (Rp)	Jml Barang	NILAI EKSTRA KOMPATABEL (Rp)	TOTAL (Rp)
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	0	0,00	0	0,00	0,00
01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	0	0,00	0	0,00	0,00
01.02	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	0	0,00	0	0,00	0,00
01.03	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	0	0,00	0	0,00	0,00
01.04	MUSIK	0	0,00	0	0,00	0,00
01.05	KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)	0	0,00	0	0,00	0,00
01.06	THREE DIMENSIONAL ARTEFACTS AND REALITA	0	0,00	0	0,00	0,00
01.07	TARSCALT	0	0,00	0	0,00	0,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	44	43.826.450,00	0	0,00	43.826.450,00
02.01	BARANG BERCORAK KESENIAN	10	43.282.700,00	0	0,00	43.282.700,00
02.02	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	0	0,00	0	0,00	0,00
02.03	TANDA PENGHARGAAN	34	543.750,00	0	0,00	543.750,00
5.03	HEWAN	0	0,00	0	0,00	0,00
03.01	HEWAN PIARAAN	0	0,00	0	0,00	0,00
03.02	TERNAK	0	0,00	0	0,00	0,00
03.03	HEWAN LAINNYA	0	0,00	0	0,00	0,00
5.04	BIOTA PERAIRAN	0	0,00	0	0,00	0,00
04.01	IKAN BERSIRIP (PISCES/IKAN BERSIRIP)	0	0,00	0	0,00	0,00
04.02	CRUSTEA (UDANG, RAJUNGAN, KEPITING, DAN SEBANGSANYA)	0	0,00	0	0,00	0,00
04.03	MOLLUSCA (KERANG, TIRAM, CUMI-CUMI, GURITA, SIPUT, DAN	0	0,00	0	0,00	0,00
04.04	COELENTERATA (UBUR-UBUR DAN SEBANGSANYA)	0	0,00	0	0,00	0,00
04.05	ECHINODERMATA (TRIPANG, BULLI BULLI, DAN SEBANGSANYA)	0	0,00	0	0,00	0,00
04.06	AMPHIBIA (KODOK DAN SEBANGSANYA)	0	0,00	0	0,00	0,00
04.07	REPTILIA (BUAYA, PENYU, KURA-KURA, BIAWAK, ULAR AIR, DA	0	0,00	0	0,00	0,00



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
REKAPITULASI BARANG KE NERACA**

PER 31-Des-2023

Provinsi : PROVINSI JAWA TENGAH
 Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
 Bidang : Bidang Kecamatan
 Unit Organisasi : Kecamatan Jebres
 Sub Unit Organisasi : Kecamatan Jebres
 U P B : Kecamatan Jebres

KODE	NAMA BARANG	Jml Barang	NILAI INTRA KOMPATABEL (Rp)	Jml Barang	NILAI EKSTRA KOMPATABEL (Rp)	TOTAL (Rp)
04.08	MAMMALIA (PAUS, LUMBA-LUMBA, PESUT, DUYUNG, DAN SEBA	0	0,00	0	0,00	0,00
04.09	ALGAE (RUMPUT LAUT DAN TUMBUH-TUMBUHAN LAIN YANG H	0	0,00	0	0,00	0,00
04.10	BICOTA PERAIRAN LAINNYA	0	0,00	0	0,00	0,00
5.05	TANAMAN	0	0,00	0	0,00	0,00
05.01	TANAMAN	0	0,00	0	0,00	0,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0,00	0	0,00	0,00
06.01	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0,00	0	0,00	0,00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0	0,00	0	0,00	0,00
07.01	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0	0,00	0	0,00	0,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0,00	0	0,00	0,00
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0,00	0	0,00	0,00
01.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0,00	0	0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	25	68.799.770,97	138	42.761.146,00	111.560.916,97
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0,00	0	0,00	0,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0,00	0	0,00	0,00
01.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0,00	0	0,00	0,00
3	ASET TIDAK BERWUJUD	0	0,00	0	0,00	0,00
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	0	0,00	0	0,00	0,00
01.01	ASET TIDAK BERWUJUD	0	0,00	0	0,00	0,00
4	ASET LAIN-LAIN	25	68.799.770,97	138	42.761.146,00	111.560.916,97
4.01	ASET LAIN-LAIN	25	68.799.770,97	138	42.761.146,00	111.560.916,97
01.01	ASET LAIN-LAIN	25	68.799.770,97	138	42.761.146,00	111.560.916,97
JUMLAH ASET		471	14.772.611.259,74	590	236.912.811,64	15.009.524.071,38

B. FUNGSI STRATEGIS KECAMATAN JEBRES

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jebres dimaksud, maka Kecamatan Jebres untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Kecamatan Jebres yaitu :

1. Visi

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*Clarity of direction*) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021 – 2026 yang merupakan penjabaran dari Visi Walikota/Wakil Walikota Surakarta, yaitu sebagai berikut:

**“Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh,
Gesit, Kreatif, dan Sejahtera”**

2. Misi

Berdasarkan pada rumusan Visi Kota Surakarta, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan.

Kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan.

Ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan.

Keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga.

Kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan.

Keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif.

Ketujuh, Mewujudkan kondusivitas daerah dan kerukunan antar umat Bergama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormat.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berdasarkan tugas pokok tersebut, Kecamatan Jebres mendukung pencapaian misi mapan.

Dalam mencapai tujuan, diperlukan indikator sebagai alat ukur keberhasilan dari suatu sasaran atau tujuan organisasi. Pemerintah Kota Surakarta memiliki Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jebres mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator
1	Meningkatkan Keberdayaan produktivitas dan keunggulan masyarakat	Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang

Selain itu, setiap perangkat daerah mempunyai pengukuran masing-masing disesuaikan dengan sasaran, untuk Kecamatan Jebres yakni:

Indikator Kinerja Kecamatan Jebres Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator
1	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan, koordinasi tugas pemerintahan dan penyelenggaraan tugas yang dilimpahkan ke kecamatan	Tingkat capaian kelurahan Berkembang
2	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien	Nilai PMPRB

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI KECAMATAN JEBRES

Adapun permasalahan utama Kecamatan Jebres yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat yakni jumlah SDM yang minim sehingga pelayanan internal dengan OPD lain maupun pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Camat Jebres pada Tahun 2023 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Walikota Surakarta untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini. Dalam melaksanakan perjanjian kinerja Camat Jebres menandatangani Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah tahun 2021 – 2026, Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026

Dalam penyusunan indikator dan target kinerja sasaran perangkat daerah, telah diatur berdasarkan Peraturan Walikota No 29 tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surakarta dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021 – 2026. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. IKU kecamatan Jebres sesuai dengan RPJMD adalah Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang.

Alasan Pemilihan Indikator: Tingkat perkembangan kelurahan dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan desa dan kelurahan setiap tahun dan setiap lima tahun yang diukur dari laju kecepatan perkembangan:

- a. Ekonomi masyarakat;
- b. Pendidikan masyarakat;
- c. Kesehatan masyarakat;
- d. Keamanan dan ketertiban;
- e. Kedaulatan politik masyarakat;
- f. Peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- g. Lembaga kemasyarakatan;
- h. Kinerja pemerintahan desa dan kelurahan; dan
- i. Pembinaan dan pengawasan.

Tabel II.1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jebres Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun	Target Tahun Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tingkat capaian kelurahan Berkembang	%	dt	dt	84,2	94	97,3	98,7	100	100

Sumber: Renstra Kecamatan Jebres 2021-2026

2. Indikator dan Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah dan Rencana Strategis Kecamatan Jebres

Berdasarkan dokumen Rencana Startegis tahun 2021-2026 Kecamatan Jebres, Kecamatan Jebres mempunyai 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator yang berbeda. Namun pada salah satu indikator pada sasaran Strategis Kecamatan Jebres sama dengan Indikator Kinerja Utama sehingga untuk penjelasan sudah sama dengan pada Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan, koordinasi tugas pemerintahan dan penyelenggaraan tugas yang dilimpahkan ke kecamatan	Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	84,19	94	97,33	98,67	100
2.	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien	Nilai PMPRB	25,2	25,4	25,6	25,8	26

B. Rencana Kinerja Tahun 2023

RENCANA KINERJA TAHUNAN KECAMATAN JEBRES

Tahun : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya keberdayaan, produktivitas dan keunggulan masyarakat	Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	94

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan	
			TAHUN 2023	
			Traget	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya keberdayaan, produktivitas dan keunggulan masyarakat	Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	%	94	44.868.149.581
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan, Koordinasi Tugas Pemerintahan dan Penyelenggaraan Tugas yang Dilimpahkan ke Kecamatan	Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	%	94	12.207.715.577
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	nilai	85.50	4.342.016.807
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata-rata nilai survey kepuasan masyarakat kelurahan	nilai	84	57.171.515
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	2.500.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dok	0	0

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen		0
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Unit Layanan berstandar ISO	%	100	172.400.773
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	172.400.773
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan		0
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		0
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Kecamatan	kegiatan	10	4.112.444.519

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	2	4.112.444.519
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan		0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase tingkat kelurahan berkembang	%	80	3.415.660.936
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase LPM aktif tingkat kecamatan	%	100	2.330.854.661
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Masyarakat	27	248.487.769
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	300.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas	63	1.770.366.892
Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1	12.000.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan		0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit		0

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		0
Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan		0
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase LPM aktif tingkat kecamatan	%	100	1.084.806.275
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Masyarakat	12	60.000.000
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Masyarakat	18	258.302.345
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	unit	11	660.799.836
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	1	13.000.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan		0
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan		0
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit		0
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan		0

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	persentase penanganan stunting di tingkat kecamatan dan kelurahan	%		0
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga		0
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga		0
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga		0
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga		0

Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga		0
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga		0
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian gangguan trantibum di kecamatan	%	100	2.231.073.589
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase gangguan keamanan dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%	100	2.199.263.002
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	2.187.619.624
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2	11.643.378
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		0

Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan		0
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi kegiatan penanganan gangguan keamanan	%	100	31.810.587
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	2	31.810.587
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan		0
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase organisasi masyarakat di tingkat kecamatan yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	%	100	189.957.530
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah	kali	2	189.957.530

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	org	20	19.735.026
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1	147.401.638
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dok	1	22.820.866
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang		0
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan		0
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen		0
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	%	100	2.029.006.715

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	2.029.006.715
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dok	60	170.000.000
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga	50	142.006.715

Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	unit	2	1.377.000.000
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	120.000.000
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dok	12	220.000.000
Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien	Nilai PMPRB	nilai	25.4	32.660.434.004
	Nilai Maturitas Kelembagaan	nilai	0	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	nilai	73.30	32.660.434.004
	Nilai Maturitas Kelembagaan	nilai	40.5	
	Nilai SPIP	nilai	2.407	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	%	100	640.774.500
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah tersusun	Dok	4	630.524.500

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	2	10.250.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase gaji yg terpenuhi tepat waktu	%	100	11.068.242.577
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang / bulan	100	11.052.867.577
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	2	15.375.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		0

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	11.275.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dok	2	5.125.000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	2	6.150.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang/tahun	0	0
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		0
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		0

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	%	100	1.271.846.560
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	72.352.500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	540.596.060
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	12.750.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	15.550.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	2	56.768.500
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Laporan	1	15.197.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan sarana aset penunjang administrasi perkantoran	%	100	13.304.701.800
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	4	832.860.300
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	4	1.098.000.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dibangun	unit	1	10.183.416.500
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	3	1.190.425.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	4.454.424.767
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	44.635.500
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	783.310.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	114.029.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3.512.450.267
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%	100	1.909.168.800

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	4	298.342.200
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	4	85.384.600
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	1	15.500.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	1.226.347.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	283.720.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		0
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 19.2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Jebres merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta sehingga kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Jebres selalu mengacu pada rencana tersebut.

C. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

Perjanjian Kinerja seperti yang telah disebutkan diatas merupakan penjelasan dari sasaran dan target yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran dimaksud sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan. Biasanya pada pagu perubahan terdapat penambahan pagu yang disesuaikan dengan kebutuhan.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 KECAMATAN JEBRES

No	Sasaran Strategis / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan
1	Meningkatnya keberdayaan, produktivitas dan keunggulan masyarakat	1. Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	94%	94
2	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan, Koordinasi Tugas Pemerintahan dan Penyelenggaraan Tugas yang Dilimpahkan ke Kecamatan	2. Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	94%	94
3	Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien	3. Nilai PMPRB	25.4 nilai	25.4
4	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip	73.30 nilai	73.30 nilai
		Nilai Maturitas Kelembagaan	40.5 nilai	40.5 nilai
		Nilai SPIP	2.407 nilai	2.407 nilai
5	Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	85.50 nilai	85.50 nilai

No	Sasaran Strategis / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan
6	tercapainya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Presentase tingkat kelurahan berkembang	80%	80%
7	tercapainya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penyelesaian gangguan trantibum di kecamatan	100%	100%
8	tercapainya cakupan organisasi masyarakat di tingkat kecamatan yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	Persentase organisasi masyarakat di tingkat kecamatan yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	100%	100%
9	tercapainya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	100%	100%
10	terselenggaranya koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Rata-rata nilai survey kepuasan masyarakat kelurahan	84 nilai	84 nilai
11	terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Persentase Unit Layanan berstandar ISO	100%	100%
12	terselenggaranya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Kecamatan	10 kegiatan	10 kegiatan
13	tercapainya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Persentase LPM aktif tingkat kecamatan	100%	100%
14	tercapainya pemberdayaan masyarakat dan lembaga tingkat kecamatan	Persentase LPM aktif tingkat kecamatan	100%	100%
15	terwujudnya koordinasi antar instansi pengamanan dan ketertiban umum	Presentase gangguan keamanan dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100%	100%
16	terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase Fasilitasi kegiatan penanganan gangguan keamanan	100%	100%
17	tercapainya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah	2 kali	2 kali
18	terlaksananya pemberdaayaan masyarakat di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100.00 %

No	Strategis / OPD / Program / Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.240.366.807,00	22.796.621.093,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.232.163.131,00	12.222.083.973,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.612.797.058,00	11.634.911.665,00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.098.222.225,00	5.052.297.321,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	149.802.200,00	60.781.000,00
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.755.136.750,00	804.226.900,00
7	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.880.315,00	11.880.315,00
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	650.663.000,00	575.291.993,00
9	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	9.561.619.816,00	11.634.911.665,00
10	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9.201.186.458,00	11.713.980.680,00
11	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	411.610.600,00	315.265.050,00
12	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.087.242.225,00	5.044.452.321,00
13	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10.980.000,00	7.845.000,00
14	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	112.167.200,00	60.781.000,00

15	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.755.136.750,00	804.226.900,00
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	----------------

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Matrik Indikator Penjabaran dari Sasaran Sesuai dengan RPJMD Kota Srakarta
Tahun 2021-2026

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun	Target Tahun Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan, koordinasi tugas pemerintahan dan penyelenggaraan tugas yang dilimpahkan ke kecamatan	Tingkat capaian kelurahan Berkembang	Persen	dt	dt	84,2	94	97,3	98,7	100	100
2	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien	Nilai PMPRB	Nilai	25	25	25	25	26	26	26	26

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Capaian Kinerja											
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I			TW II			TW III			TW IV		
							Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
(1)	(3)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15=14:10)	(16)	(17)	(18=17:11)	(19)	(20)	(21=20:12)	(22)	(23)	(24=23:13)	(25)
1	Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	%	94	94	94	94	100	106,38	Sangat Berhasil	100	106,38	Sangat Berhasil	100	106,38	Sangat Berhasil	100	106,38	Sangat Berhasil
2	Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	%	94	94	94	94	100	106,38	Sangat Berhasil	94	100	Sangat Berhasil	94	100	Sangat Berhasil	100	106,38	Sangat Berhasil
3	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	nilai	85,5	85,5	85,5	85,5	93,23	109,04	Sangat Berhasil	91,48	106,99	Sangat Berhasil	92,21	107,85	Sangat Berhasil	94,44	110,46	Sangat Berhasil
4	Rata-rata nilai survey kepuasan masyarakat kelurahan	nilai	84	84	84	84	91,52	108,95	Sangat Berhasil	97,76	116,38	Sangat Berhasil	91,91	109,42	Sangat Berhasil	92,19	109,75	Sangat Berhasil
5	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1	1	1	1	100	Sangat Berhasil	1	100	Sangat Berhasil	1	100	Sangat Berhasil	1	100	Sangat Berhasil

6	Persentase Unit Layanan berstandar ISO	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Berhasil									
7	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	100	Sangat Berhasil									
8	Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Kecamatan	Kegiatan	10	10	10	10	10	100	Sangat Berhasil									
9	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	100	Sangat Berhasil									
10	Presentase tingkat kelurahan berkembang	%	80	80	80	80	100	125	Sangat Berhasil	100	125	Sangat Berhasil	80	100	Sangat Berhasil	100	125	Sangat Berhasil
11	Persentase LPM aktif tingkat kecamatan	&	100	100	100	100	100	100	Sangat Berhasil									
12	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	100	Sangat Berhasil									
13	Persentase LPM aktif tingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Berhasil									
14	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	3	3	3	3	3	100	Sangat Berhasil									
15	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	2	2	2	2	2	100	Sangat Berhasil									

16	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	1	0	0	0	1	100	Sangat Berhasil	0	100	Sangat Berhasil	0	100	Sangat Berhasil	0	100	Sangat Berhasil
17	Persentase penyelesaian gangguan trantibum di kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Berhasil									
18	Presentase gangguan keamanan dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Berhasil									
19	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	3	3	3	3	100	Sangat Berhasil									
20	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	100	Sangat Berhasil									
21	Persentase Fasilitas kegiatan penanganan gangguan keamanan	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Berhasil									
22	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	Laporan	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	100	Sangat Berhasil									

	Kepolisian Negara Republik Indonesia																	
23	Persentase organisasi masyarakat di tingkat kecamatan yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Berhasil									
24	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah	Kali	1	1	0	0	1	100	Sangat Berhasil	1	100	Sangat Berhasil	0	100	Sangat Berhasil	0	100	Sangat Berhasil
25	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	20	0	0	0	20	100	Sangat Berhasil	0	100	Sangat Berhasil	0	100	Sangat Berhasil	0	100	Sangat Berhasil
26	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	100	Sangat Berhasil									
27	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	100	Sangat Berhasil									

28	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Berhasil									
29	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	0	100	100	100	100	Sangat Berhasil	0	100	Sangat Berhasil	100	100	Sangat Berhasil	100	100	Sangat Berhasil
30	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	3	0	0	0	3	100	Sangat Berhasil	0	100	Sangat Berhasil	0	100	Sangat Berhasil	0	100	Sangat Berhasil
31	Nilai PMPRB	Nilai	25,4	25,4	25,4	25,4	30,41	119,72	Sangat Berhasil									
32	Nilai Sakip	Nilai	73,3	73,3	73,3	73,3	76,45	104,3	Sangat Berhasil									
	Nilai Maturitas Kelembagaan	Nilai	40	40	40	40	46	115		46	115		46	115		51	127,5	

	Nilai SPIP	Nilai	2,41	2,41	2,41	2,41	2,42	100,41		2,42	100,41		4,01	166,39		4,01	166,39	
33	persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Berhasil									
34	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah tersusun	Dokumen	1	1	1	1	1	100	Sangat Berhasil									
35	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	100	Sangat Berhasil									
36	persentase gaji yg terpenuhi tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Berhasil									
37	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	95	95	95	95	83	87,37	Sangat Berhasil	83	87,37	Sangat Berhasil	79	83,16	Berhasil	80	84,21	Berhasil
38	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	100	Sangat Berhasil									
39	Persentase pemenuhan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Berhasil									

40	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	3	3	2	2	100	Sangat Berhasil	3	100	Sangat Berhasil	3	100	Sangat Berhasil	2	100	Sangat Berhasil
41	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1	1	1	0	1	100	Sangat Berhasil	1	100	Sangat Berhasil	1	100	Sangat Berhasil	0	100	Sangat Berhasil
42	persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Berhasil									
43	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	3	3	3	100	Sangat Berhasil									
44	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	3	3	3	3	3	100	Sangat Berhasil									
45	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	1	1	1	1	100	Sangat Berhasil									
46	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	3	3	3	3	3	100	Sangat Berhasil									
47	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	3	3	3	3	3	100	Sangat Berhasil									
48	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	100	Sangat Berhasil									

49	Persentase pengadaan sarana aset penunjang administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Berhasil									
50	Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0	0	1	0	0	100	Sangat Berhasil	0	100	Sangat Berhasil	1	100	Sangat Berhasil	0	100	Sangat Berhasil
51	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	1	0	0	0	100	Sangat Berhasil	1	100	Sangat Berhasil	0	100	Sangat Berhasil	0	100	Sangat Berhasil
52	Jumlah gedung yang dibangun	unit	0	1	0	0	0	100	Sangat Berhasil	1	100	Sangat Berhasil	0	100	Sangat Berhasil	0	100	Sangat Berhasil
53	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	1	0	0	0	100	Sangat Berhasil	1	100	Sangat Berhasil	0	100	Sangat Berhasil	0	100	Sangat Berhasil
54	Presentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Berhasil									
55	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	3	3	3	3	100	Sangat Berhasil									
56	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	3	3	3	100	Sangat Berhasil									
57	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3	3	3	3	100	Sangat Berhasil									
58	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3	3	3	3	100	Sangat Berhasil									

59	persentase barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%	25	25	25	25	25	100	Sangat Berhasil									
60	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	2	2	2	2	2	100	Sangat Berhasil									
61	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	1	1	1	1	100	Sangat Berhasil									
62	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	1	1	0	0	100	Sangat Berhasil	1	100	Sangat Berhasil	1	100	Sangat Berhasil	0	100	Sangat Berhasil

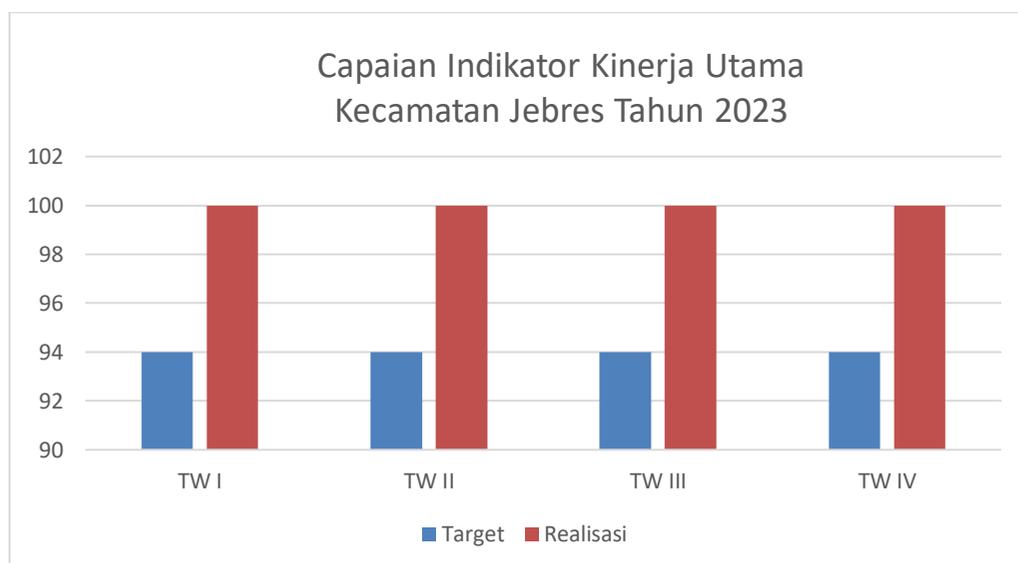
A. Sasaran I : Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan, koordinasi tugas pemerintahan dan penyelenggaraan tugas yang dilimpahkan ke kecamatan

1. Progres capaian antara target dan realisasi kinerja triwulanan selama tahun 2023

Dalam indikator kinerja utama perangkat daerah yakni Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang didapatkan dari hasil input dari 11 (sebelas) kelurahan se-Kecamatan Jebres melalui aplikasi <http://epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/>. Untuk target disesuaikan dengan yang sudah disusun sesuai dengan Renstra Kecamatan Jebres Tahun 2021-2026.

NO	Indikator	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	%	94	100	94	100	94	100	94	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target, realisasi sudah banyak yang melebihi dari target yang telah ditentukan. Terkait dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini.



Pada tabel diatas tertera bahwa capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah telah melebihi target. Dalam tabel diatas dijelaskan juga jika dalam 1 (satu) tahun anggaran realisasinya sama karena presentase hasil dari Indikator Kinerja Utama dalam 1 (satu) tahun juga nilainya sama. Dalam pengisian 1 (satu) tahun pada aplikasi epdeskel nilai setiap kelurahan sudah dapat dilihat sehingga nilai yang didapat bisa sama.

2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Dalam penjelasan ini, akan disampaikan terkait Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dari tahun 2021 dimana tahun tersebut adalah awal dari indikator Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang pertama kali digunakan dan merupakan tahun awal dari Renstra Kecamatan Jebres Tahun 2021-2026.

NO	Indikator	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	Persen	n/a	n/a	84,2	100	94	100

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan dalam bentuk tabel terkait Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dengan Indikator Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang mulai dari awal RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 yang selanjutnya diturunkan menjadi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Pada tabel yang akan dijelaskan bahwa indikator kinerja utama yang digunakan Kecamatan Jebres sesuai dengan Peraturan Wali Kota Terkait Indikator Utama Perangkat Daerah, Indikator Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang mempunyai realisasi telah melebihi target yang ditentukan. Dari sini terlihat bahwa kinerja Kecamatan Jebres jika dilihat dari Indikator Kinerja Utama mempunyai kinerja melebihi target. Untuk predikat bisa disesuaikan dengan tabel dibawah ini:

Skala Pengukuran Kinerja

NO	PREDIKAT	NILAI	MEAN
1	Sangat Berhasil	$n > 85$	92.5
2	Berhasil	$70 < n \leq 85$	77.5
3	Cukup Berhasil	$55 < n \leq 70$	62.5
4	Tidak Berhasil	$n < 55$	27.5

Capaian indikator kinerja dirumuskan sebagai berikut:

- a. Jika semakin tingginya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja utama berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target dikalikan 100% sesuai dengan tabel yang telah dijelaskan diatas. Dalam artian bahwa jika target semakin tinggi dan realisasi sudah maksimal sehingga capaian setiap tahun menjadi turun karena realisasi setiap tahun sudah maksimal.

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{2 \times \text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran Capaian Sasaran Kecamatan Jebres Tahun 2023

NO	Indikator	Satuan	Tahun 2021				Tahun 2022				Tahun 2023				Tahun 2026 (Akhir RPJMD)		Predikat
			Targ et	Realis asi	Capaian (%)	Predikat	Targ et	Realis asi	Capaian (%)	Predikat	Targ et	Realis asi	Capaian (%)	Predikat	Target	Capaian (%)	
1.	Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	%	n/a	n/a	n/a	Tidak Berhasil	84,2	100	118	Sangat Berhasil	94	100	106,88	Sangat Berhasil	100	100	Sangat Berhasil



4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama ini terjadi karena beberapa faktor pendorong, yaitu:

- a. Pengukuran sudah lebih jelas dan mudah dihitung karena terdapat formula penghitungan
- b. Tingkat partisipasi masyarakat khususnya di kelurahan terhadap pelaporan pada sistem evaluasi tingkat perkembangan meningkat
- c. Kegiatan yang dilakukan khususnya yang dilakukan kelurahan, semakin inovatif dan kreatif

Sementara itu, beberapa faktor yang dapat menghambat pencapaian indikator RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026 antara lain :

- a. data yang tersaji kurang uptodate
- b. Penumpukan penginputan dan sistem menjadi lambat

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - [\text{Realisasi Biaya} / \text{Target Biaya} \times 100\%]$$

Pada tahun 2023 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp 18.126.326.107,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp 18.417.193.494,-. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah **100% - 98,42% = 1,580%**. Persentase efisiensi biaya tersebut tergolong kecil sehingga diasumsikan tidak terdapat efisiensi yang signifikan dalam penggunaan biaya.

Pada tahun 2023 terjadi refocusing pagu anggaran sebanyak 15% dari total anggaran, disajikan berdasarkan tabel dibawah ini:

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja
- a) PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT



Sertijab TP PKK Kecamatan Jebres



Perayaan Natal PKK

b) PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM



Peningkatan Kapasitas Forum Pembauran Kecamatan



Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan

c) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM



zoom peningkatan kewaspadaan bencana



Pelatihan PBB dan Ketahanan Fisik



Rapat Koordinasi Linmas Kecamatan dan Kelurahan

d) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN



Pentas Keroncong Malam Kamis Legen



Evaluasi Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan



Rapat Koordinasi dengan BPS



Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini



Sosialisasi Pendidikan Karakter serta Kepribadian Remaja



Rakor Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan



Kegiatan Srawung Budaya Hari Kesatu



Kegiatan Srawung Budaya Hari Ke-2

B. Sasaran : meningkatnya kualitas kinerja pelayanan, koordinasi tugas pemerintahan dan penyelenggaraan tugas yang dilimpahkan ke kecamatan

Berdasarkan Renstra Kecamatan Jebres Tahun 2021-2026, Kecamatan Jebres mempunyai 2 (dua) sasaran OPD yakni meningkatnya kualitas kinerja pelayanan, koordinasi tugas pemerintahan dan penyelenggaraan tugas yang dilimpahkan ke kecamatan dan Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien. Dalam sasaran yang pertama mempunyai indikator yang sama dengan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jebres yakni Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang. Sehingga pada sub bab ini sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

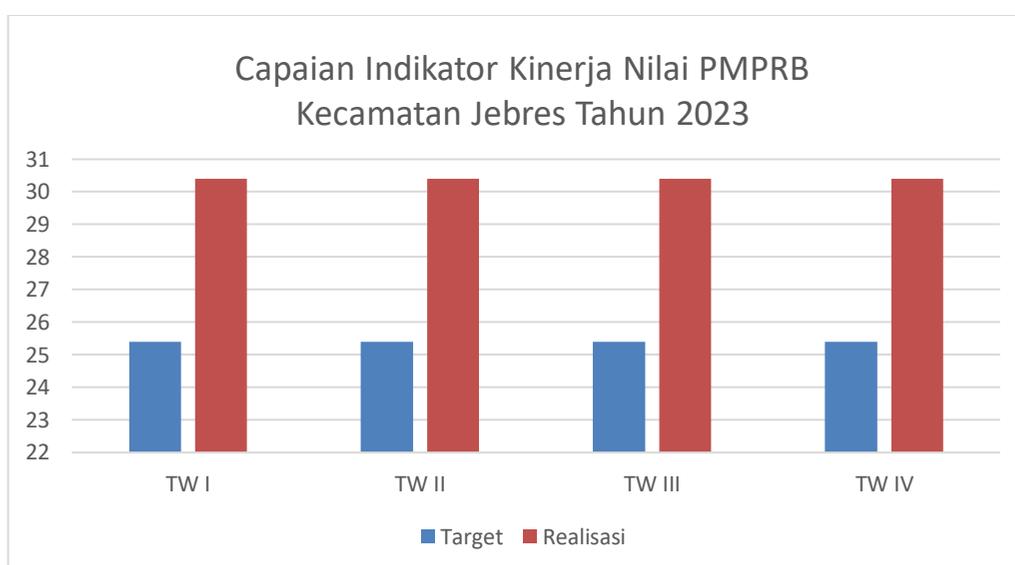
C. Sasaran : Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien

Sasaran ketiga merupakan sasaran dari kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan yang ada di Kecamatan Jberes. Indikator Kinerja yang digunakan yakni Nilai PMPRB. Namun untuk tahun selanjutnya, indikator dari sasaran ini tidak lagi menggunakan Nilai PMPRB karena sudah tidak relevan dengan peraturan yang ada. Sebagai gantinya, terdapat indikator kegiatan yang ditarik ke atas menjadi indikator program, yakni indikator Nilai Maturitas Kelembagaan.

1. Progres capaian antara target dan realisasi kinerja triwulanan selama tahun 2023

Untuk Kecamatan Jebres, target dan realisasi akan dijelaskan melalui tabel dibawah ini:

NO	Indikator	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Nilai PMPRB	nilai	25,4	30,41	25,4	30,41	25,4	30,41	25,4	30,41

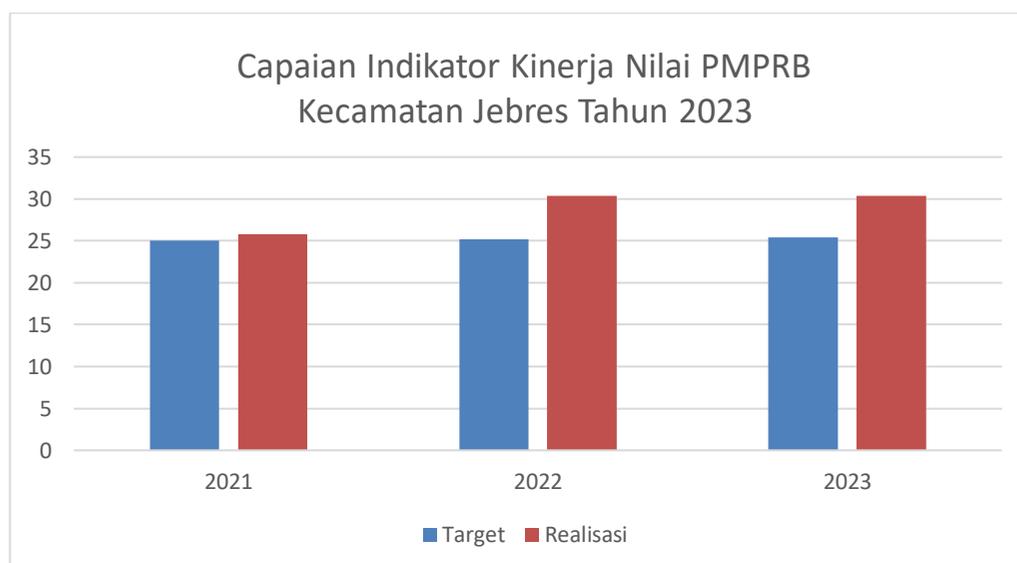


Pada tabel diatas tertera bahwa capaian Indikator Kinerja Kecamatan Jebres sama antara triwulan I sampai triwulan IV. Hal ini dikarenakan nilai tahun lalu. Hal ini dikarenakan indikator Nilai PMPRB sudah tidak relevan dengan peraturan yang berlaku sehingga data realisasi masih menggunakan tahun lalu. Rencana kedepan Nilai PMPRB akan digantikan dengan nilai Maturitas Kelembagaan. Maturitas Kelembagaan merupakan salah satu indikator program penunjang urusan pemerintahan Dimana merupakan program dari sasaran Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien dinaikkan menjadi indikator dari sasaran di tahun-tahun kedepan.

2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Dalam penjelasan ini, akan disampaikan terkait Indikator Kinerja dari sasaran kedua yakni Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien. Indikator masih menggunakan Nilai PMPRB yang merupakan indikator dari sasaran yang telah ditentukan sesuai dengan Renstra Kecamatan Jebres Tahun 2021-2026. Dalam bentuk tabel akan dijelaskan dibawah ini:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2026	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Capaian
Nilai PMPRB	25	25,76	25,2	30,41	25,4	30,41	26	100



Telah dijelaskan bahwa mulai dari tahun 2024 nantinya, indikator Nilai PMPRB sudah tidak digunakan lagi. Itulah sebabnya mengapa nilai tahun 2022 dengan tahun 2023 adalah sama. Untuk penilaian menggunakan tahun 2022 karena tahun 2023 merupakan tahun pergantian dari nilai itu sendiri didapatkan dari melengkapi bukti dukung dari tahun sebelumnya. Berkaitan dengan mulai tahun 2023, indikator Nilai PMPRB menggunakan format yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk pengisian dengan menggunakan borang yang sudah disesuaikan dengan aturan yang ada sehingga perangkat daerah

memenuhi form yang ada, dilampiri dengan link bukti dukung yang sesuai dengan form yang diminta. Untuk hasilnya, tidak terdapat nilai yang disajikan secara kuantitatif namun tersaji dalam bentuk kualitatif.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa Indikator Nilai PMPRB merupakan indikator yang digunakan untuk menjalankan Program Penunjang Urusan Pemerintahan sehingga yang ada di dalam program tersebut adalah kegiatan dari kegiatan rutin perangkat daerah. Dalam penentuan Nilai dari Indikator ini juga digunakan sebagai tolok ukur dalam menentukan nilai organisasi.

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan dalam bentuk tabel terkait Indikator Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai PMPRB. Indikator ini merupakan indikator dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan dan dilanjutkan menjadi urusan penunjang pemerintahan mulai dari awal RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 yang selanjutnya diturunkan menjadi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Pada tabel yang akan dijelaskan bahwa indikator kinerja utama yang digunakan Kecamatan Jebres sesuai dengan Peraturan Wali Kota Terkait Indikator Utama Perangkat Daerah, Indikator Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang mempunyai realisasi telah melebihi target yang ditentukan. Dari sini terlihat bahwa kinerja Kecamatan Jebres jika dilihat dari Indikator Kinerja Utama mempunyai kinerja melebihi target. Untuk predikat bisa disesuaikan dengan tabel dibawah ini:

Skala Pengukuran Kinerja

NO	PREDIKAT	NILAI	MEAN
1	Sangat Berhasil	$n > 85$	92.5
2	Berhasil	$70 < n \leq 85$	77.5
3	Cukup Berhasil	$55 < n \leq 70$	62.5
4	Tidak Berhasil	$n < 55$	27.5

Capaian indikator kinerja dirumuskan sebagai berikut:

- a. Jika semakin tingginya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja utama berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target dikalikan 100% sesuai dengan tabel yang telah dijelaskan diatas. Dalam artian bahwa jika target semakin tinggi dan realisasi sudah maksimal sehingga capaian setiap tahun menjadi turun karena realisasi setiap tahun sudah maksimal.

- c. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{2 \times \text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan dalam bentuk tabel terkait Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dengan Indikator Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang mulai dari awal RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 yang selanjutnya diturunkan menjadi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Dilengkapi dengan predikat capaian dengan skala pengukuran kinerja seperti tabel yang sudah dijelaskan sebelumnya.

NO	Indikator	Satuan	Tahun 2021				Tahun 2022				Tahun 2023				Tahun 2026 (Akhir RPJMD)		Predikat
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Target	Capaian (%)	
.1	Nilai PMPRB	Nilai	25	25,76	103	Sangat berhasil	25,2	30,41	120	Sangat Berhasil	25,4	30,41	120	Sangat Berhasil	100	100	Sangat Berhasil



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama ini terjadi karena beberapa faktor pendorong, yaitu:

- a. Pengukuran sudah lebih jelas dan mudah dihitung karena terdapat formula penghitungan
- b. Tingkat partisipasi masyarakat khususnya di kelurahan terhadap pelaporan pada sistem evaluasi tingkat perkembangan meningkat
- c. Kegiatan yang dilakukan khususnya yang dilakukan kelurahan, semakin inovatif dan kreatif

Sementara itu, beberapa faktor yang dapat menghambat pencapaian indikator RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026 antara lain :

- c. data yang tersaji kurang uptodate
- d. Penumpukan penginputan dan sistem menjadi lambat

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

Persentase efisiensi Biaya = $100\% - [\text{Realisasi Biaya} / \text{Target Biaya} \times 100\%]$

Pada tahun 2023 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp 18.126.326.107,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp 18.417.193.494,-. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah **$100\% - 98,42\% = 1,580\%$** . Persentase efisiensi biaya tersebut tergolong kecil sehingga diasumsikan tidak terdapat efisiensi yang signifikan dalam penggunaan biaya.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan



Netralitas ASN



Kunjungan dari Kecamatan Kademangan



Penandatanganan terkait Kegiatan Hakordia



Rakor Camat Lurah



Rakor Camat Lurah

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan, pagu anggaran di Kecamatan Jebres seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel Realisasi Anggaran Kecamatan Jebres Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN
		SEBELUMNYA	SETELAH	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	14.385.255.022,00	13.928.129.374,00	13.928.129.374,00
2	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADA	105.268.750,00	42.500.000,00	42.500.000,00
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	533.262.315,00	3.113.842.815,0	3.113.842.815,00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	514.545.000,00	550.612.800,00	543.424.753,0
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	670.635.600,00	435.875.050,00	423.657.250,00

Sumber: Laporan Definitif Kecamatan Jebres Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Kecamatan Jebres yakni Rp. 18.165.236.027,00 secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp 11.706.857.326,00
2. Belanja Barang & Jasa , sebesar Rp 4.885.390.296,00
3. Belanja Modal, sebesar Rp 1.572.988.405,00

C. PENCAPAIAN LAINNYA

Pada tahun 2023, Kecamatan Jebres mendapatkan meraih apresiasi terkait Penunjukan sebagai Perangkat Daerah WBK menuju WBBM dan Nilai EKPP A- dan akan selalu menjadi objek EKPP Kota Surakarta selama 6 (enam) tahun yang akan datang. Selain itu juga sebagai Juara II PORWASO Tahun 2023. Pada tahun 2023 terdapat kelurahan yang menjadi Juara Lomba Bangga Kecana yakni Kelurahan Jagalan. Selain itu, Kelurahan Jebres juga mendapat Juara I Lomba Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023.



**Juara 1 Penyusunan dan Penyajian
Laporan Keuangan Tahun 2023**

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Capaian Tahun 2023
 - a. Meningkatnya keberdayaan, produktivitas dan keunggulan masyarakat
 - b. Meningkatkan kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah agar efektif dan efisien
 - c. Pengukuran capaian sasaran meningkatnya keberdayaan, produktivitas dan keunggulan masyarakat Tahun 2023 sesuai dengan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026, dikatakan **sangat baik** dengan capaian 118 persen
 - d. Pengukuran capaian sasaran Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien tahun 2022 sesuai dengan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 sebesar 30,41
2. Faktor Pendorong :
 - a. Kemampuan SDM yang selalu mau untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
 - b. Inovasi yang selalu digali untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Faktor Penghambat :

 - a. Kurangnya koordinasi dengan kelurahan sehingga terkadang kegiatan berjalan saling berbenturan
 - b. Kurangnya minat masyarakat untuk mengembangkan kreativitas melalui lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
3. Efisiensi Biaya pada level program sebesar 1,580%. Persentase efisiensi biaya tersebut tergolong kecil sehingga diasumsikan tidak terdapat efisiensi yang signifikan dalam penggunaan biaya
4. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 5 program dan 18 kegiatan.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja ke Depan

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Jebres di masa mendatang antara lain :

1. Mengintensifkan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang telah ada dan mendorong terbentuknya lembaga/organisasi kemasyarakatan guna mewadahi berbagai kepentingan masyarakat.
2. Meningkatkan potensi SDM dari Kecamatan agar meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
3. Meningkatkan koordinasi baik internal Kecamatan dan Kelurahan serta dengan *stakeholder* Kecamatan

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Aktivitas
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan	Pembangunan Kantor Kelurahan Pemekaran Sejumlah 3 (tiga) gedung

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun 2023, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang

Sekian dan terima kasih.

Surakarta, 31 Desember 2023


CAMAT JEBRES

DYAH SARASWATI, S.STP, M.A.P



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

LKjIP 2023

KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA